

TINJAUAN ELEKTRONISASI SISTEM PEMBAYARAN KLAIM KECELAKAAN DI PT. JASA RAHARJA PADA MASA PANDEMI

¹Wuri Cahyaning Pramusti, ^{2*}Elana Era Yusdita, ³Selvia Angger Sari

¹²³Universitas PGRI Madiun

¹wuricahyaning2@gmail.com, ^{2*}elaradita@unipma.ac.id, ³selviaanggersari@gmail.com

ABSTRACT

The number of traffic accidents during the pandemic is still high despite the large-scale social restrictions (PSBB) set by the government. The high number of accidents has an impact on the filing of traffic accident claims. Claims payments in Eks-Karesidenan Madiun are based at PT Jasa Raharja (Persero) Madiun Branch Representative Office so that claims payments become complex. This should be minimized with good systems and procedures given the current pandemic conditions. This study aims to analyze the cash expenditure system of compensation to PT. Jasa Raharja (Persero) Madiun Branch Representative Office during the Covid 19 pandemic. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques with interviews, observations and documentation. The results showed that the system and procedure for payment of accident claim at PT Jasa Raharja (Persero) Madiun Representative Office has been supported in efforts to improve its internal control. The application system used in Jasa Raharja has adopted the development of revolution 4.0 so that in its internal control is good even though there are trapping functions

Keywords: Cash Expenditure System and Procedure; Internal Control

ABSTRAK

Angka kecelakaan lalu lintas pada masa pandemi masih tinggi walaupun adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan oleh pemerintah. Tingginya angka kecelakaan ini berdampak pada pengajuan klaim kecelakaan lalu lintas. Pembayaran klaim di Eks-Karesidenan Madiun berpusat di PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun sehingga pembayaran klaim menjadi kompleks. Hal ini harus dapat diminimalkan dengan sistem dan prosedur yang baik mengingat kondisi pandemi seperti saat ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sistem pengeluaran kas pemberian santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun di masa pandemi Covid 19. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan di PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Madiun sudah mendukung dalam upaya meningkatkan pengendalian internnya. Sistem aplikasi yang digunakan di Jasa Raharja telah mengadopsi perkembangan revolusi 4.0 sehingga dalam pengendalian internalnya sudah baik walaupun terdapat perangkapan fungsi

Kata Kunci: Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas; Pengendalian Internal

Submitted: 28 Juli 2022

Revised: 17 Oktober 2022

Accepted: 26 November 2022

Email korespondensi : elaradita@unipma.ac.id

PENDAHULUAN

Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada masa pandemi. Walaupun demikian, angka kecelakaan lalu lintas masih besar. Berdasarkan data analisa dan evaluasi kinerja pelayanan perwakilan madiun pada bulan April, terjadi 168 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adanya 220 korban. Penyerahan santunan mencapai 2,7 miliar. Jika dibandingkan tahun lalu, penyerahan santunan menurun sekitar 51%. Pada bulan Mei sampai Juli 2020 jumlah penyerahan santunan mencapai 10 miliar rupiah. Walaupun terjadi perubahan sistem kerja pada masa pandemi, Jasa Raharja wajib memprioritaskan pelayanan yang ramah dan kecepatan dalam menyalurkan santunan kepada korban, sehingga kegiatan pelayanan berjalan seperti biasanya. Akibatnya, semua kegiatan berubah dengan beralih ke digital, misalnya survei klaimen, survei korban kecelakaan lalu lintas yang di rawat di rumah sakit maupun meninggal dunia.

Kecelakaan yang terjadi biasanya karena kelalaian pengendara maupun pengendara lain. Jenis kecelakaan beragam mulai dari tabrak lari, kecelakaan dua kendaraan, kecelakaan beruntun, sampai dengan kecelakaan pribadi tanpa disebabkan oleh kendaraan lain. Kasus yang sering terjadi adalah tidak ada tanggung jawab dari pelaku penyebab kecelakaan untuk ganti rugi akibat ulahnya. Bukan hanya itu saja, terkadang kecelakaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri, korban tidak mampu untuk membayar perawatan yang ada di rumah sakit karena mahalnya biaya perawatan. Biasanya korban meminjam uang dari rekan ataupun rentenir dengan biaya tambahan berupa bunga berjalan.

Korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh dua kendaraan atau lebih, korban tabrak lari dijamin oleh Jasa Raharja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Sedangkan dana yang diberikan dihimpun dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan setiap tahunnya bersama dengan pajak kendaraan bermotor. Selain itu dana yang dihimpun berasal dari Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum, Kereta Api, Pesawat Udara, dan Kapal Laut yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Besarnya santunan yang diberikan kepada setiap korban berbeda-beda sesuai dengan sifat cedera yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965.

Sistem dan prosedur pengeluaran kas yang memadai khususnya pembayaran santunan korban kecelakaan lalu lintas sangat diperlukan. Adanya sistem dan prosedur yang memadai dan baik dapat mengawasi pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Menurut Mulyadi (2017) pengendalian internal yang baik dalam sebuah perusahaan akan menjamin investasi para investor dan kreditur yang diinvestasikan dalam perusahaan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Dengan begitu, aset perusahaan dapat terjaga dan terlindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pengendalian internal ini dapat mencegah kecurangan (*fraud*) yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan, bahkan negara jika berurusan dengan Jasa Raharja.

Sistem pengeluaran kas yang baik terdiri dari dokumen, catatan, fungsi yang terkait, dan jaringan prosedur yang membentuk sistem (Mulyadi, 2017). Dokumen yang digunakan bertujuan untuk melakukan pencatatan sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi para pihak berkepentingan. Fungsi yang terkait digunakan perusahaan untuk mengawasi jalannya transaksi.

Putri & Setiawan (2016) menyatakan bahwa Standar Operasional Prosedur pengendalian internal kas dalam penerimaan dan pengeluaran kas berjalan lancar apabila menggunakan dokumen-dokumen yang sesuai dan orang yang bertanggung jawab sesuai dengan bagiannya. Hal ini sebanding dengan Kabuhung (2013) yang melakukan penelitian pada organisasi nirlaba bahwa sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai dan berjalan lancar ketika organisasi tersebut memenuhi unsur-unsur pokok sistem informasi seperti dokumen, sumber daya manusia, peralatan, catatan, dan laporan. Selain itu menurut Sumarauw (2013) evaluasi sistem pengeluaran kas dalam penyelesaian penyerahan santunan dapat berjalan efektif apabila menggunakan metode pengendalian yang baik. Namun, ternyata ada salah satu perusahaan yaitu PT Jasa Raharja cabang perwakilan Malang yang masih belum menerapkan SOP pengendalian internal secara penuh. Hal ini dibuktikan oleh Sugiastuti et al. (2014) bahwa tidak ada pembagian tugas secara tegas dalam menyelesaikan dokumen untuk mencatat laporan, misalnya kwitansi tanpa dibubuhi "Lunas", dan otorisasi yang seharusnya dilakukan oleh kepala perwakilan namun tidak dilakukan.

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis sistem pengeluaran kas pemberian santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan

Cabang Madiun di masa pandemi Covid 19. Sistem pengeluaran kas mengalami perubahan karena adanya pandemi yang diharuskan untuk melakukan semua kegiatan secara daring. Selain itu, PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun membawahi 6 kabupaten di karesidenan Madiun. Enam kabupaten/kota sekaresidenan Madiun yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Ngawi. Dalam hal ini menjadikan sistem pembayaran klaim yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisa sistem pengeluaran kas pemberian santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun di masa pandemi Covid 19.

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Sistem akuntansi adalah kumpulan formulir, catatan, dan laporan yang disusun untuk membantu manajemen menghasilkan informasi keuangan yang mereka butuhkan untuk membuat bisnis mereka lebih mudah dioperasikan (Mulyadi, 2017). Salah satu fungsinya adalah sebagai penyedia informasi tentang keadaan dan posisi keuangan (Purwati et al., 2021). Sistem akuntansi ini sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Catatan akuntansi yang terlibat dalam sistem akuntansi pengeluaran (Mulyadi, 2017) yaitu:

1. Jurnal pengeluaran kas

Pencatatan utang menggunakan *account payable system*, pencatatan pengeluaran kas menggunakan jurnal pengeluaran kas, sedangkan untuk mencatat pembelian menggunakan jurnal pembelian. Dasar pencatatan pengeluaran kas adalah dokumen sumber yang dicap "lunas" oleh fungsi kas.

2. Register cek

Register cek berfungsi sebagai catatan pengeluaran kas perusahaan yang menggunakan cek.

Fitur-fitur yang terkait dengan sistem pembayaran tunai perusahaan (Mulyadi, 2017) yaitu:

1. Fungsi untuk pengeluaran kas.

Fungsi ini mengajukan permintaan cek kepada fungsi akuntansi jika memerlukan kas, misalnya untuk pembayaran jasa. Fungsi akuntansi berhak memutuskan pengajuan permintaan cek disetujui atau ditolak.

2. Fungsi kas.

Jika pengeluaran kas menggunakan cek, maka fungsi kas bertanggung jawab untuk mengisi cek, memohonkan otorisasinya, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos. Jika pengeluaran tidak melalui cek, maka fungsi ini bertugas membayarkan langsung kepada kreditur.

3. Fungsi akuntansi.

Tanggung jawab fungsi akuntansi adalah:

- a. Mencatat pengeluaran kas yang berhubungan dengan beban dan persediaan.
- b. Mencatat transaksi pengeluaran kas ke register cek atau jurnal pengeluaran kas.
- c. Memberikan otorisasi ke fungsi kas dengan membuat bukti kas keluar untuk mengeluarkan cek sesuai nilai tercatat dalam dokumen tersebut. Selain itu fungsi ini juga bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung dasar pembuatan bukti kas keluar.

4. Fungsi pemeriksa internal.

Fungsi ini dibutuhkan di dalam sistem pengeluaran kas untuk menghitung kas secara berkala, lalu mencocokkan hasilnya dengan saldo kas di catatan akuntansi. Selain itu, fungsi ini juga melakukan pemeriksaan terhadap saldo *cash in hand* dan membuat rekonsiliasi bank secara berkala. Fungsi ini sangat penting karena memiliki tujuan: (1) melindungi aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, (2) mendorong efisiensi dan memastikan kepatuhan kepada kebijakan/aturan manajemen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam prosedur klaim kecelakaan. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai lima informan yaitu dua orang pada bagian pelayanan, satu orang pada bagian keuangan dan sumber daya manusia, satu orang pada bagian teknik, dan satu orang di bagian kasir. Wawancara pertama yang dilakukan

peneliti ke bagian pelayanan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan pengajuan berkas klaim. Wawancara kedua, di bagian keuangan dan sumber daya manusia untuk mengetahui bagaimana prosedur berkas klaim yang sudah diverifikasi. Wawancara ketiga, di bagian teknik untuk mengetahui bagaimana keadaan pemasukan selama masa pandemi yang berdampak pada penyerahan santunan. Wawancara keempat, di bagian kasir untuk mengetahui prosedur dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengeluaran kas penyerahan santunan. Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi bagaimana prosedur pembayaran klaim kecelakaan lalu lintas kepada korban/ahli waris. Hasil wawancara dari berbagai informan digunakan untuk triangulasi sumber, untuk kemudian dilakukan triangulasi teknik dengan menggunakan hasil observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil wawancara dan observasi dituangkan dalam bentuk narasi, untuk kemudian digambar dalam bentuk flowchart. Narasi dan flowchart tersebut dianalisis kekurangan dan kelebihan dalam pembahasan.

Sistem dan Prosedur Pembayaran Klaim Kecelakaan

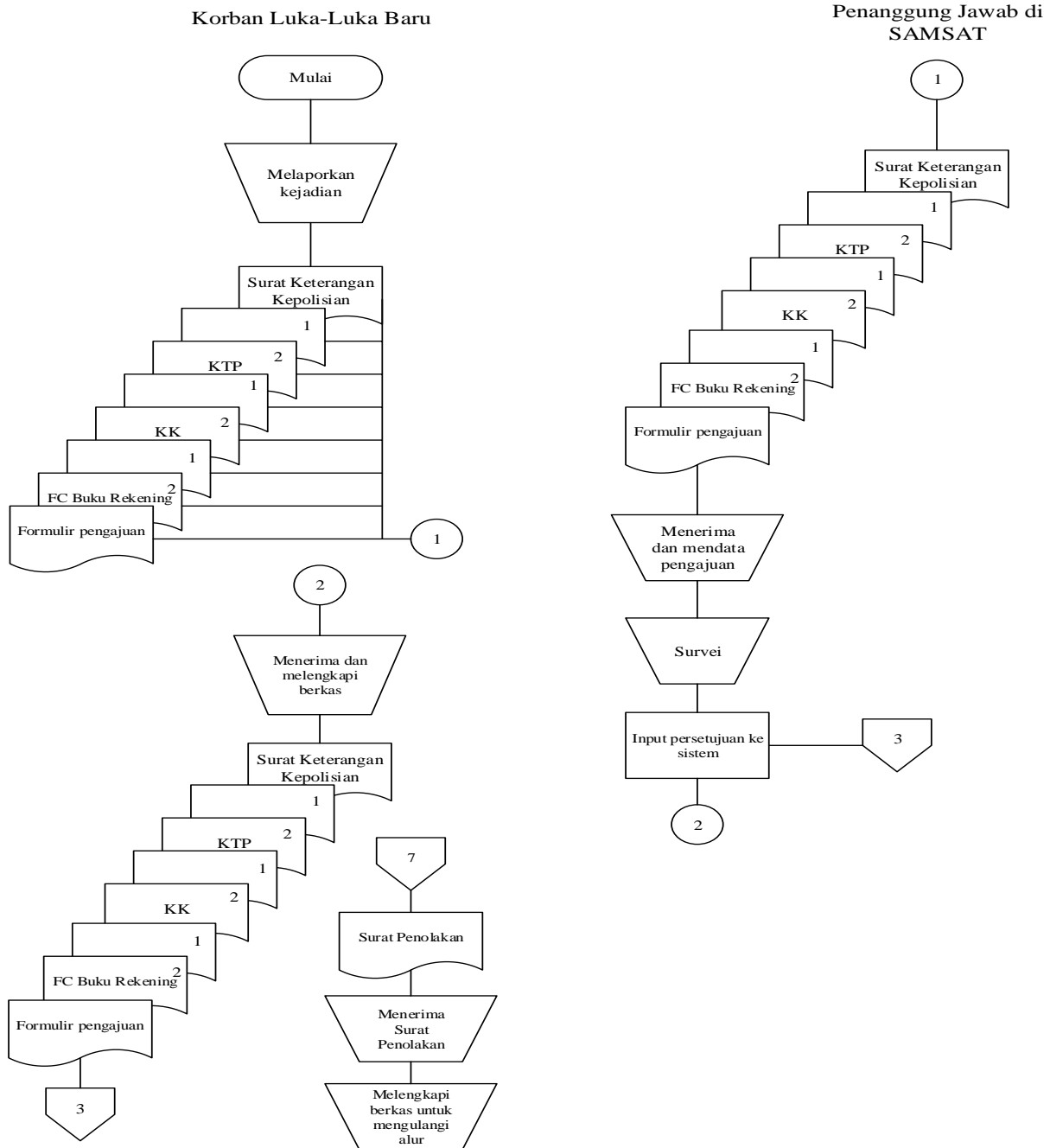
Berikut langkah yang harus ditempuh korban atau ahli waris untuk mendapatkan klaim dari PT Jasa Raharja.

1. Korban yang mengalami kecelakaan atau ahli waris korban yang meninggal dunia melaporkan kejadian ke kantor kepolisian terdekat. Korban/ahli waris melaporkan kejadian ke SAMSAT terdekat.
2. Pihak kepolisian mengecek STNK dan tempat kejadian atau menanyakan alur terjadinya kecelakaan.
3. Pihak kepolisian mengeluarkan Surat Keterangan Kepolisian.
4. Pegawai PT. Jasa Raharja yang bertanggung jawab di SAMSAT menerima berkas Surat Keterangan Kepolisian dan data pribadi korban/ahli waris. Selanjutnya, staf Jasa Raharja yang bertanggung jawab di SAMSAT melakukan survei.

5. Kemudian korban/ahli waris mengajukan berkas ke bagian pelayanan di kantor Jasa Raharja. Terdapat beberapa kriteria cedera yang dapat diberi santunan yaitu:
 - a. Luka-luka
Berkas yang harus dibawa korban luka-luka adalah KK, KTP, fotocopy rekening dan kwitansi rumah sakit.
 - b. Cacat
Berkas yang harus dibawa korban cacat adalah KK, KTP, fotocopy rekening, foto luka cacat dan surat dokter.
 - c. Meninggal dunia
Berkas yang harus dibawa korban cacat adalah KK, KTP korban dan ahli waris, fotocopy rekening, akte nikah.
Selanjutnya, berkas di cek ulang kebenarannya.
6. Kelengkapan pengajuan berkas klaim diserahkan ke bagian keuangan dan SDM untuk di validasi. Jika berkas ditolak akan dikembalikan ke korban/ahli waris untuk dilengkapi. Jika diterima akan diserahkan ke kepala perwakilan untuk di setujui/diotorisasi.
7. Berkas yang sudah diotorisasi diserahkan kepada bagian kasir untuk memproses pembayaran klaim.
8. Berkas yang sudah diotorisasi diserahkan ke bagian pelayanan untuk diarsipkan. Hard file diarsipkan sesuai tanggal, dan soft file diinput ke DASI.
9. Kasir mengecek ulang kebenaran berkas pengajuan klaim. Pembayaran klaim dengan cara transfer ke rekening korban/ahli waris.
10. Bagian keuangan dan SDM mencetak Surat Perintah Transfer (SPT) kemudian diberikan kepada bagian kasir.
11. Kasir membuat Surat Perintah Bayar (SPB) kepada BRI. Kasir selanjutnya mentransfer pembayaran klaim melalui aplikasi CMS. Pembayaran sudah berhasil dilakukan, SPT dibubuhi tanda cap "Lunas dan bertanggung" serta dibubuhi materai sebagai bukti pembayaran secara online oleh bagian keuangan.
12. Kasir mengeluarkan Bukti Kas Keluar (BKK) sebagai bukti pengeluaran kas.

13. Setelah itu, kasir menjurnal transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam Daftar Harian Jurnal (DHJ) dan Daftar Harian Kas (DHK).
14. Daftar Harian Jurnal (DHJ) dan Daftar Harian Kas (DHK) diserahkan ke kepala perwakilan untuk diotorisasi.
15. Selanjutnya, SPT, SPB, DHJ dan DHK diserahkan kepada bagian keuangan dan SDM. Hard file diarsipkan sesuai tanggalnya dan soft file dikirimkan ke kantor pusat melalui email dan diinput ke DASI sebagai bukti dan arsip.

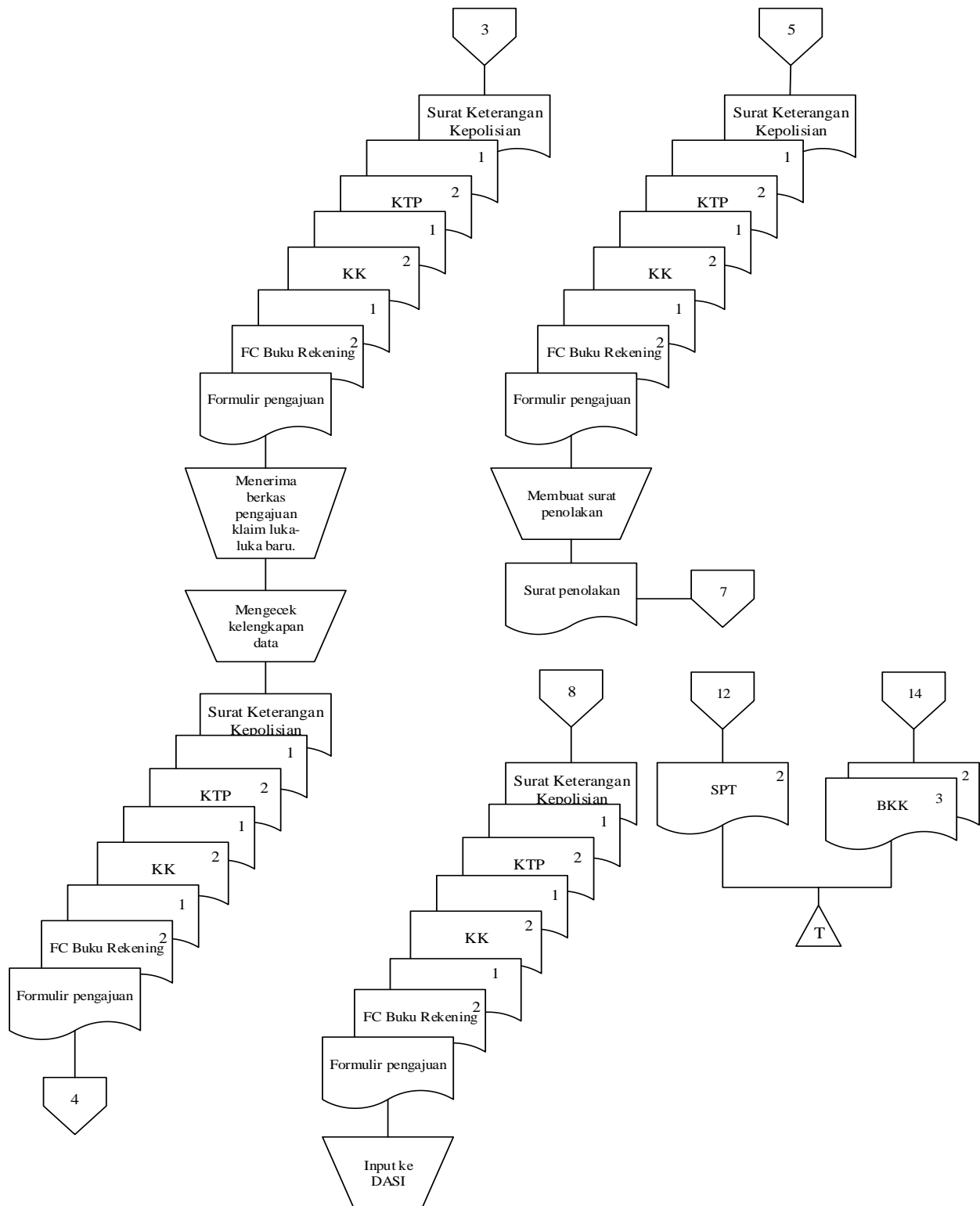
Flowchart Pembayaran Klaim Kecelakaan



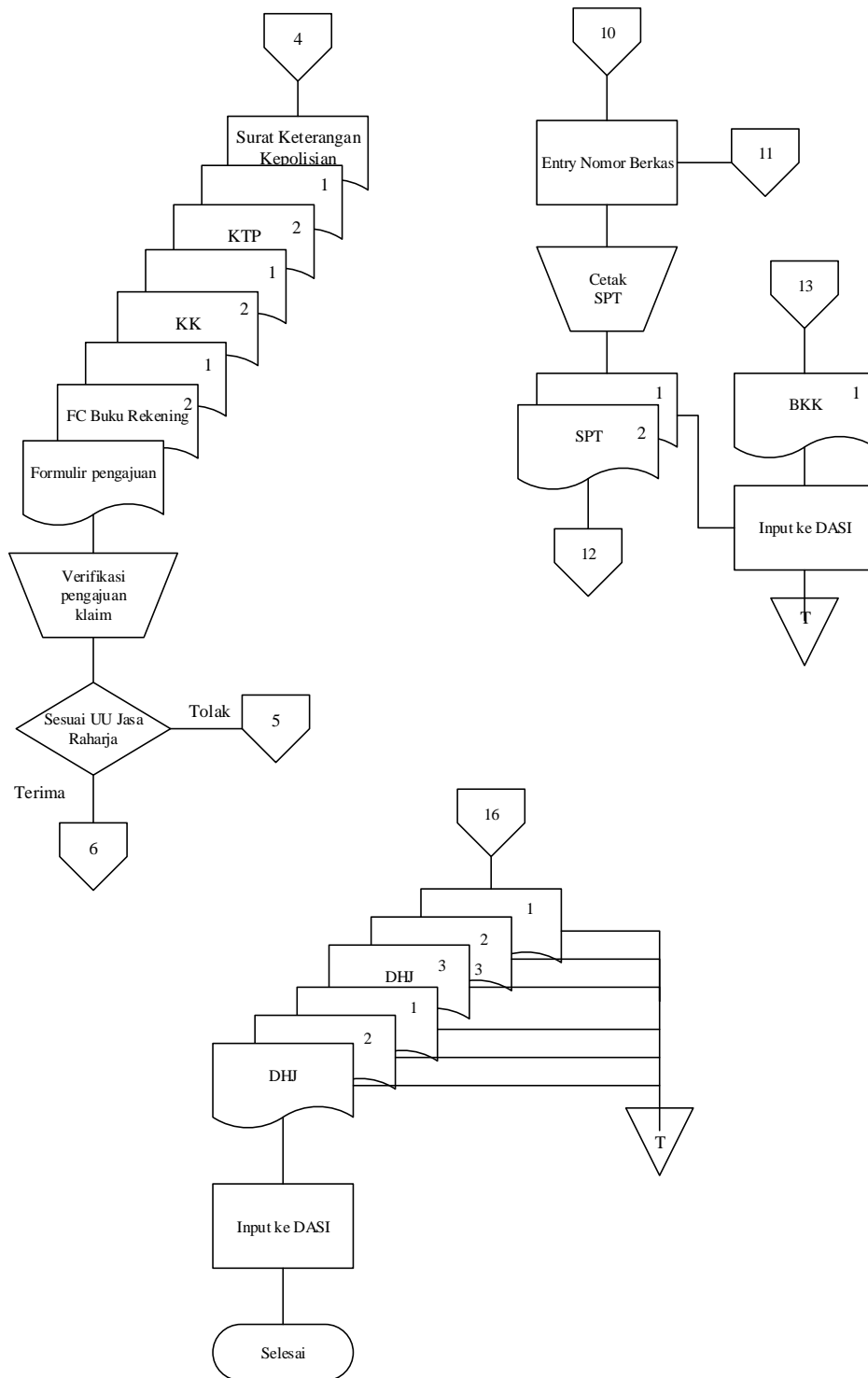
Gambar 1. Flowchart Pembayaran Klaim Kecelakaan Korban Luka-Luka

Sumber: Hasil wawancara dan observasi oleh peneliti

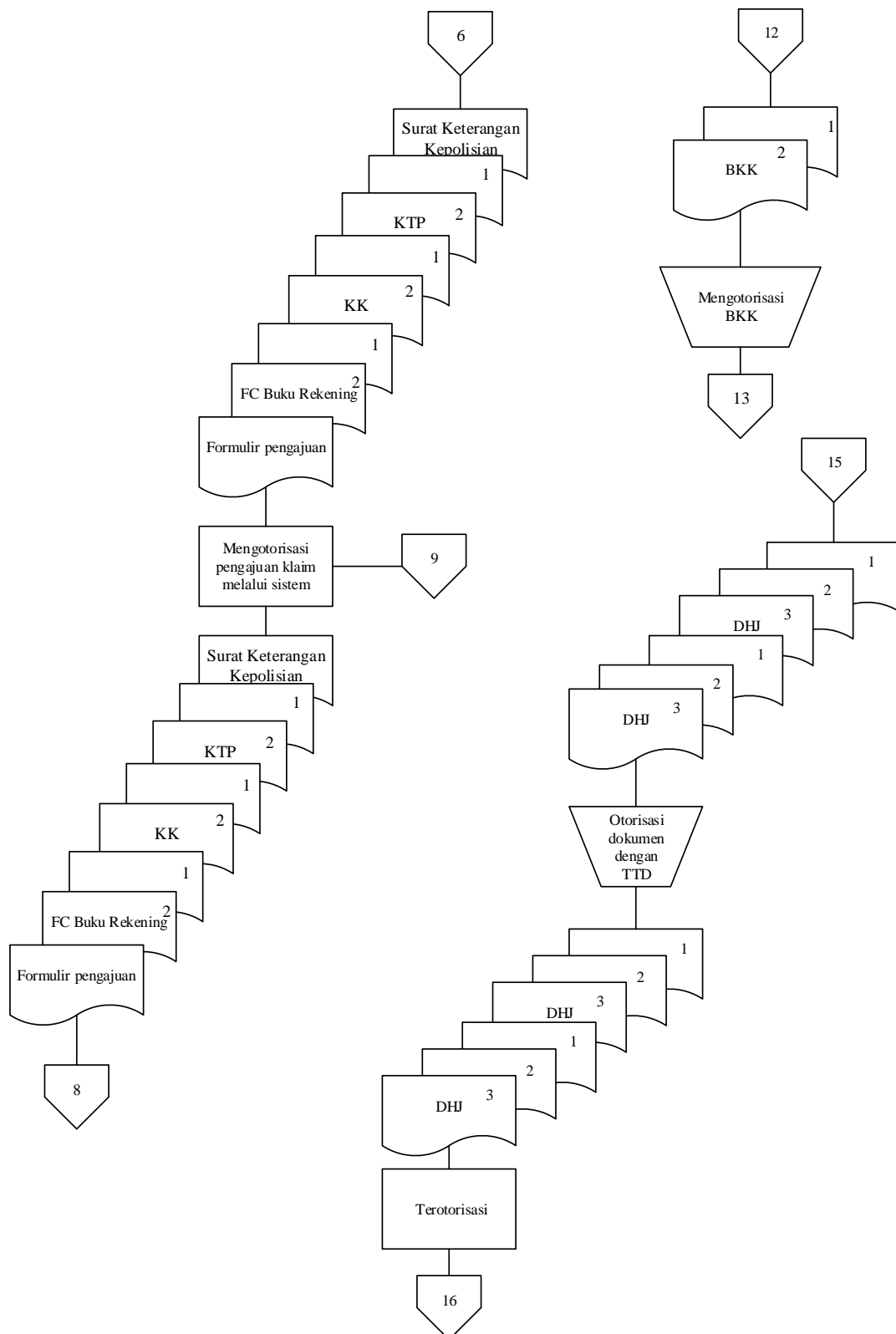
Bidang Pelayanan



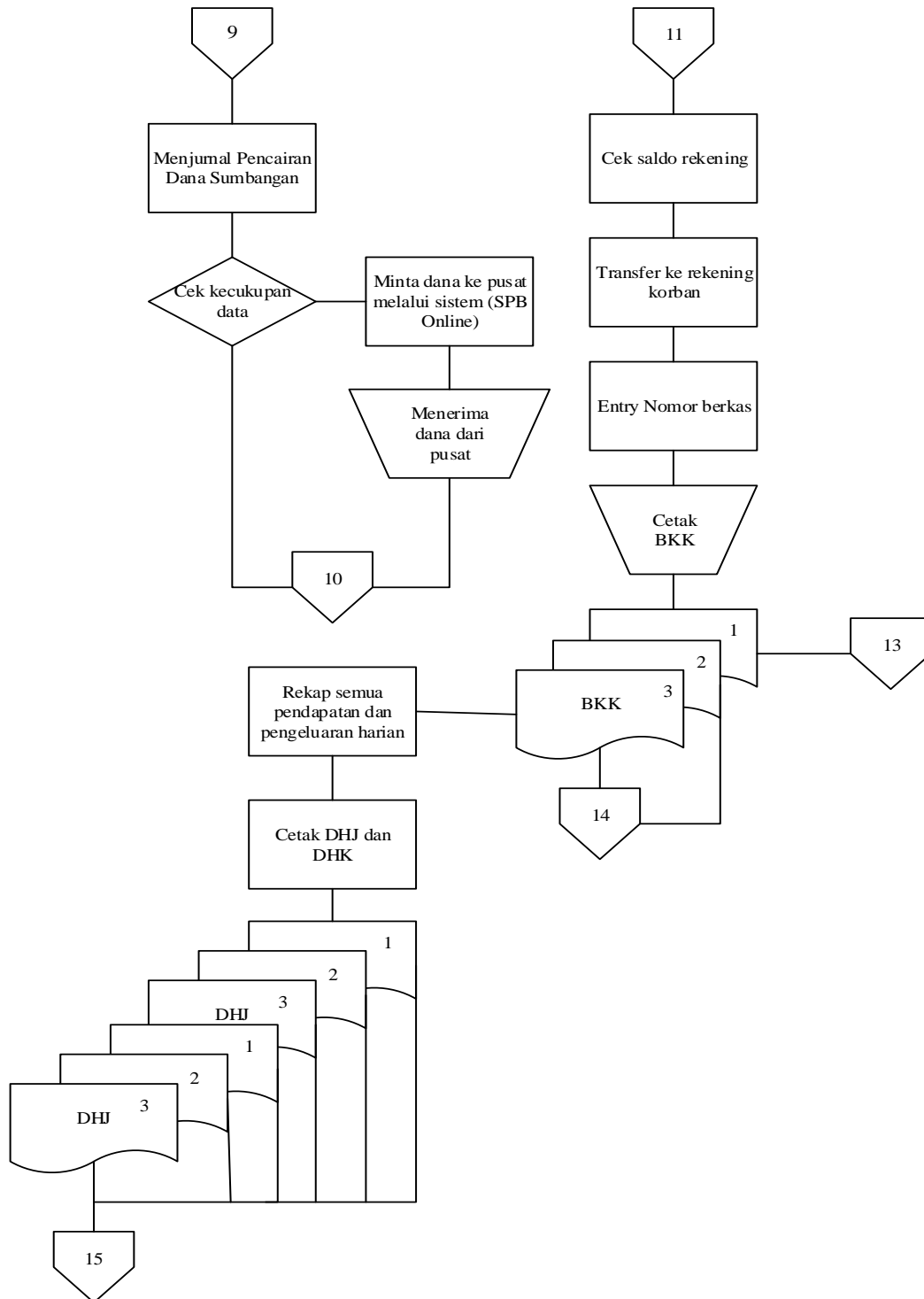
Bagian Keuangan Umum dan Sumber Daya Manusia

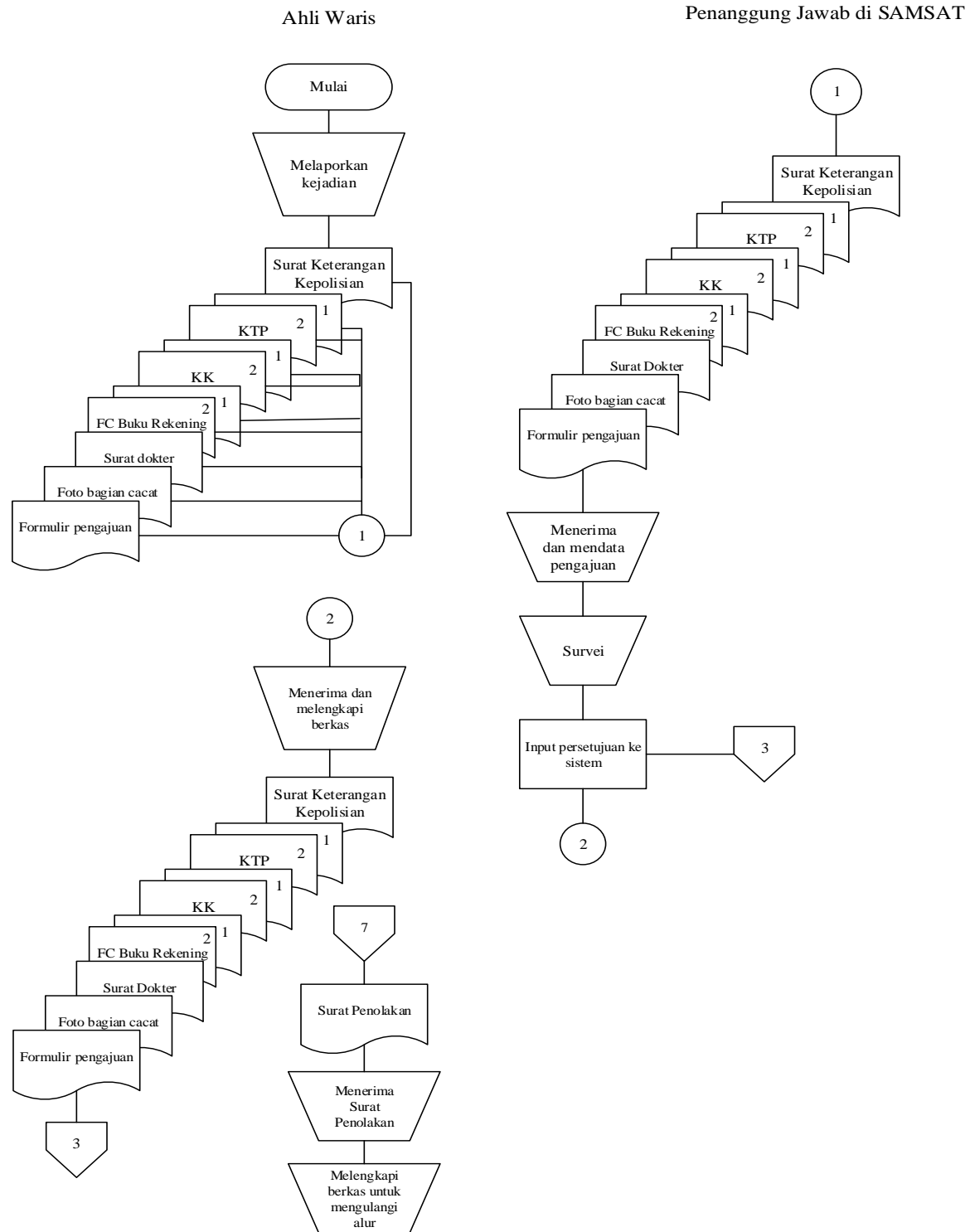


Kepala Perwakilan



Kasir

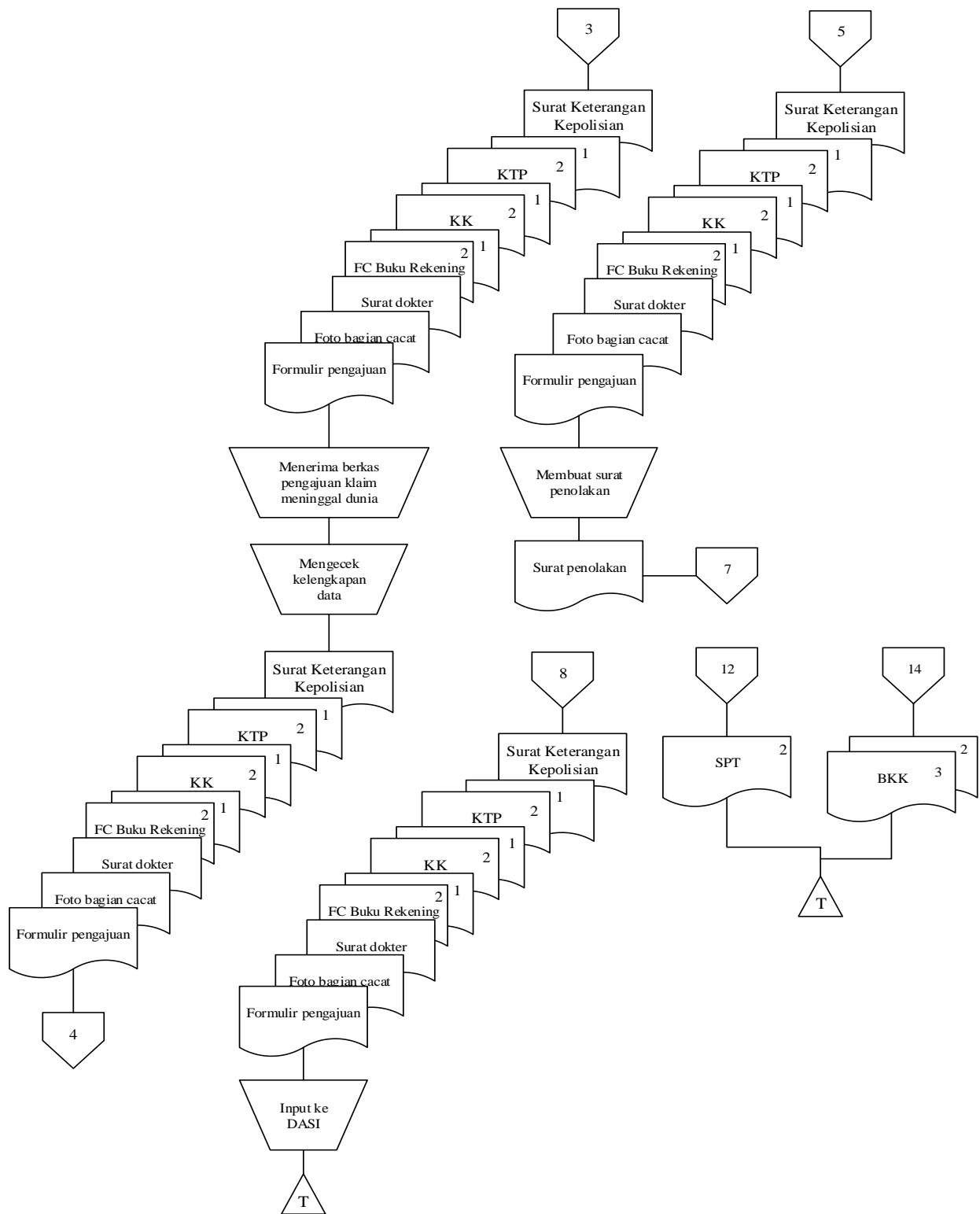




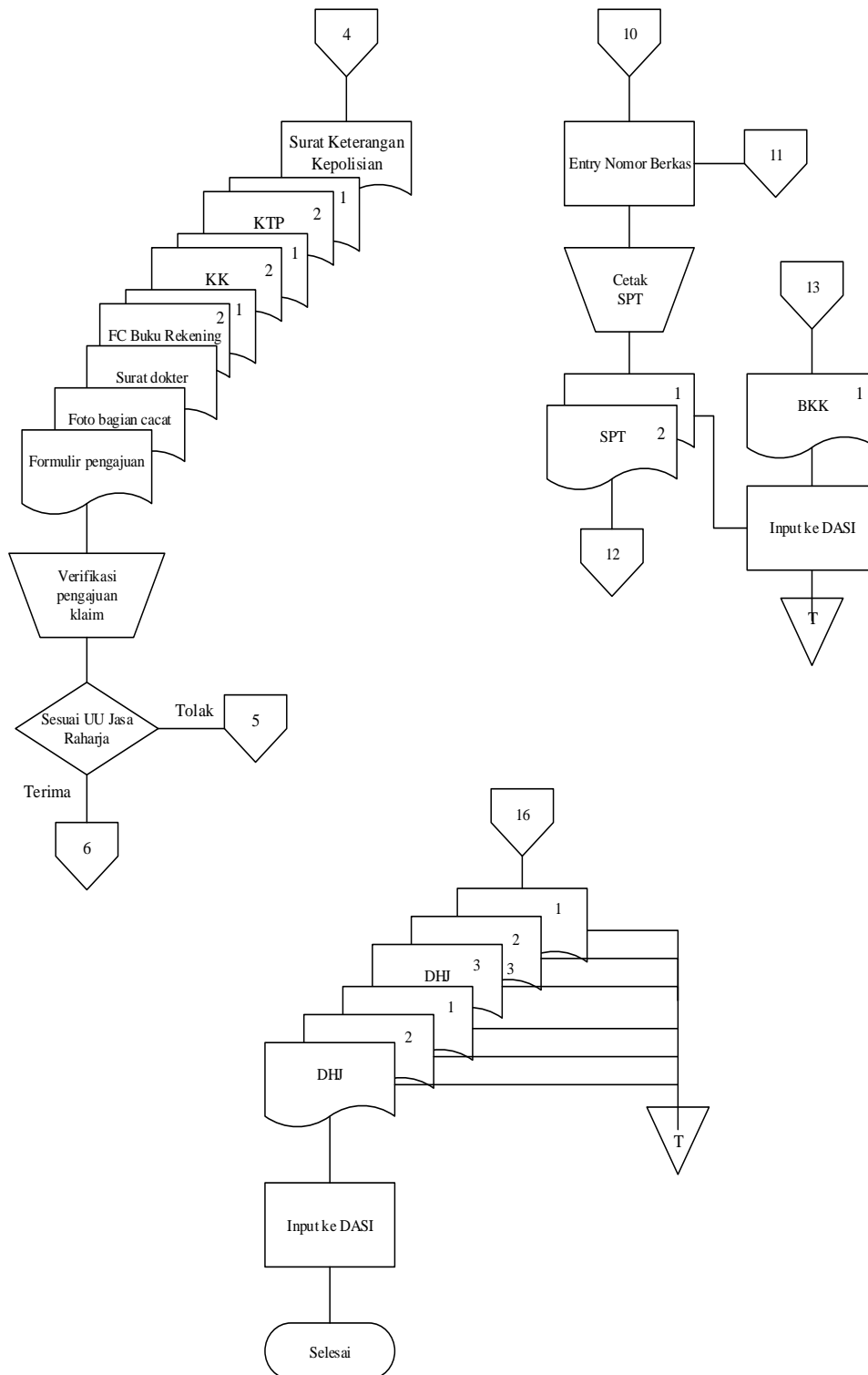
Gambar 2. Flowchart Pembayaran Klaim Kecelakaan Korban Cacat

Sumber: Hasil wawancara dan observasi oleh peneliti

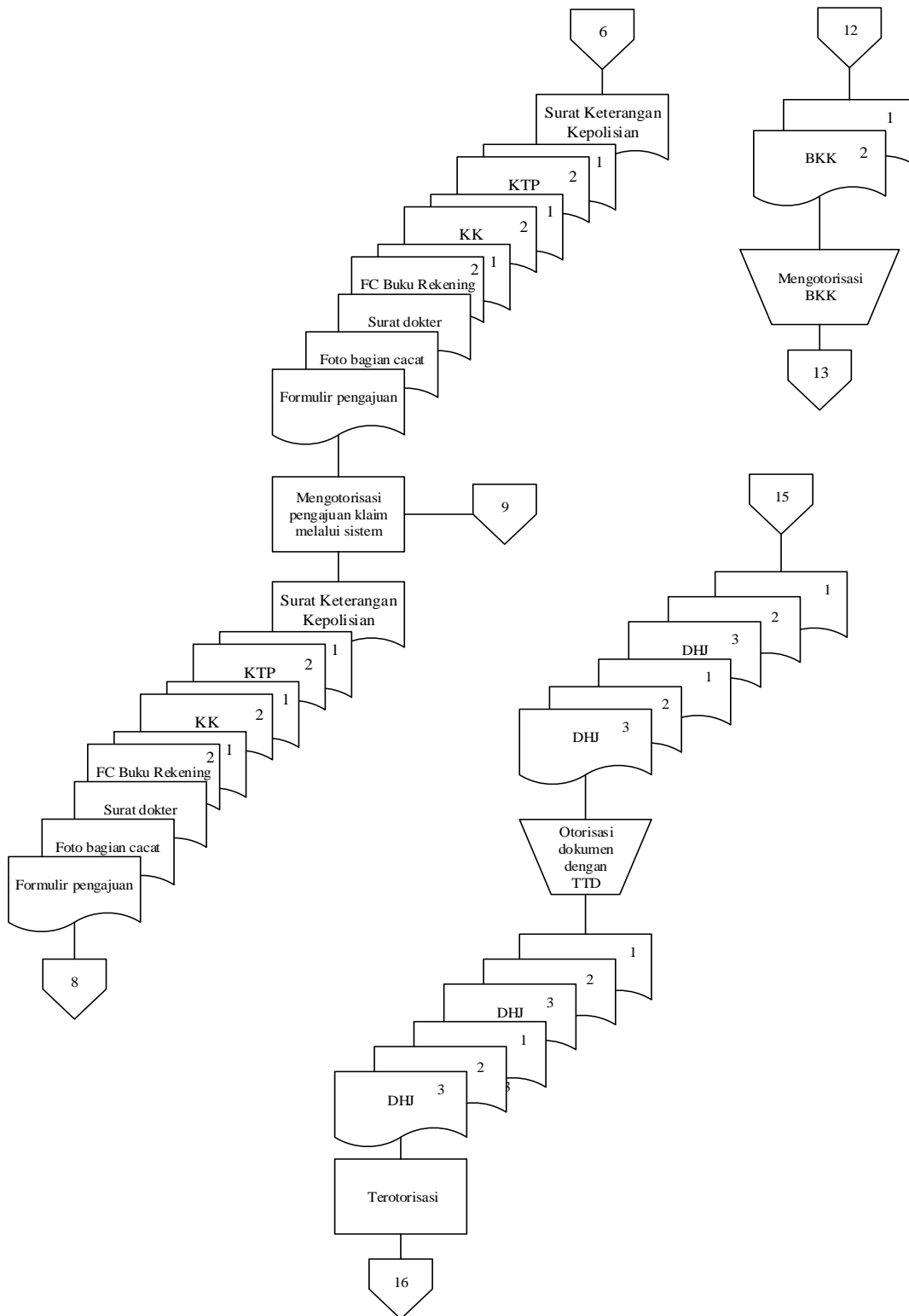
Bidang Pelayanan



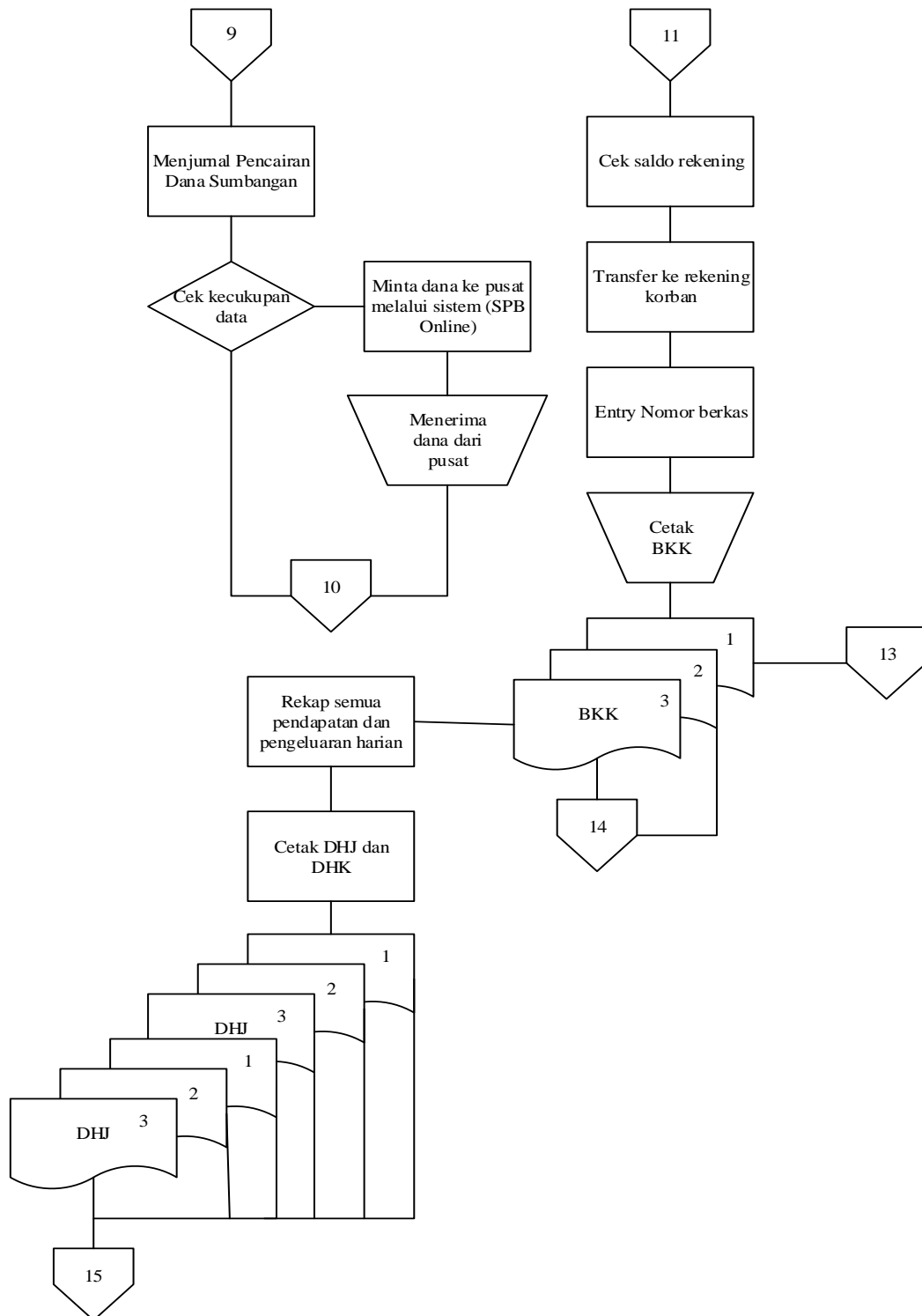
Bagian Keuangan Umum dan Sumber Daya Manusia

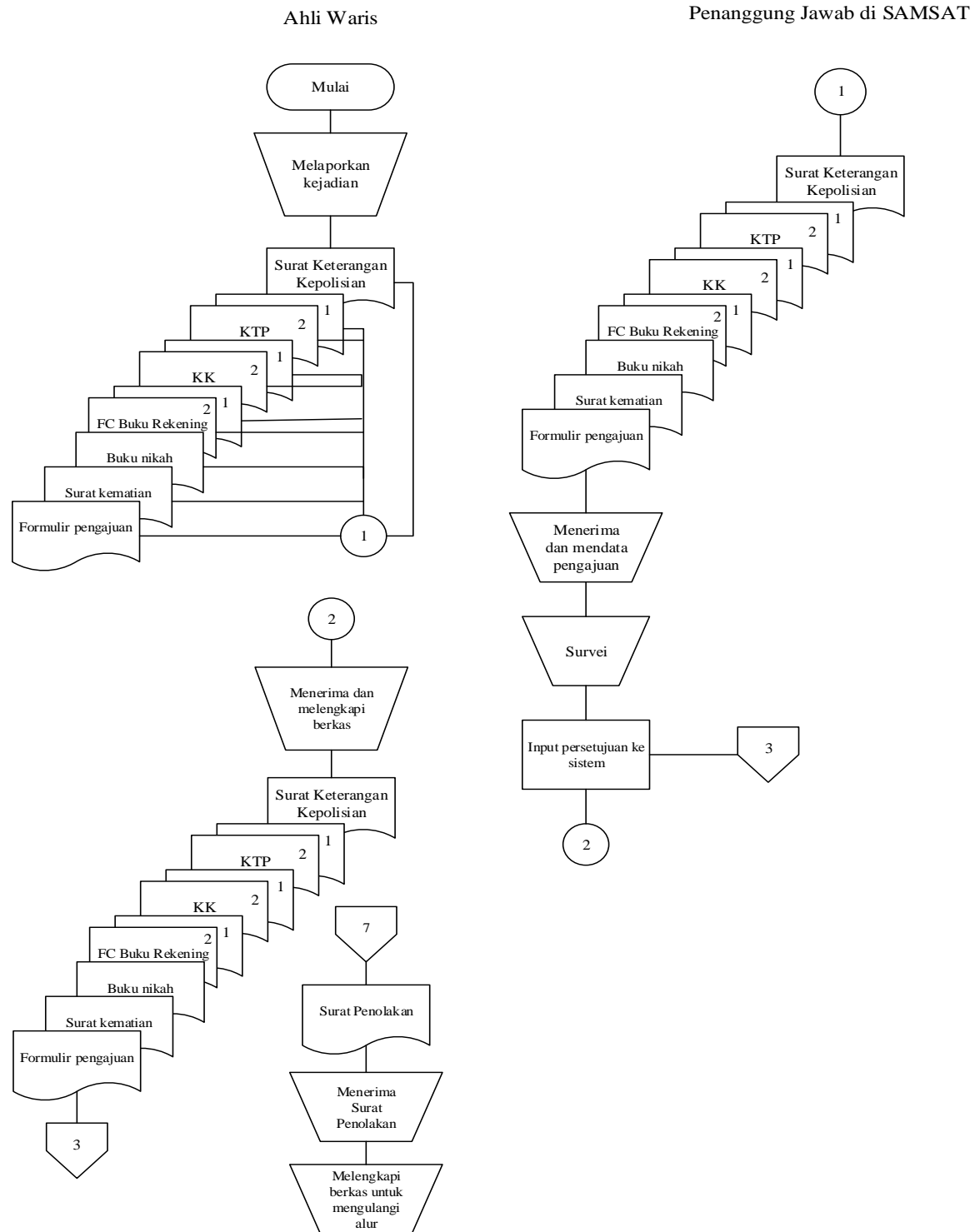


Kepala Perwakilan



Kasir

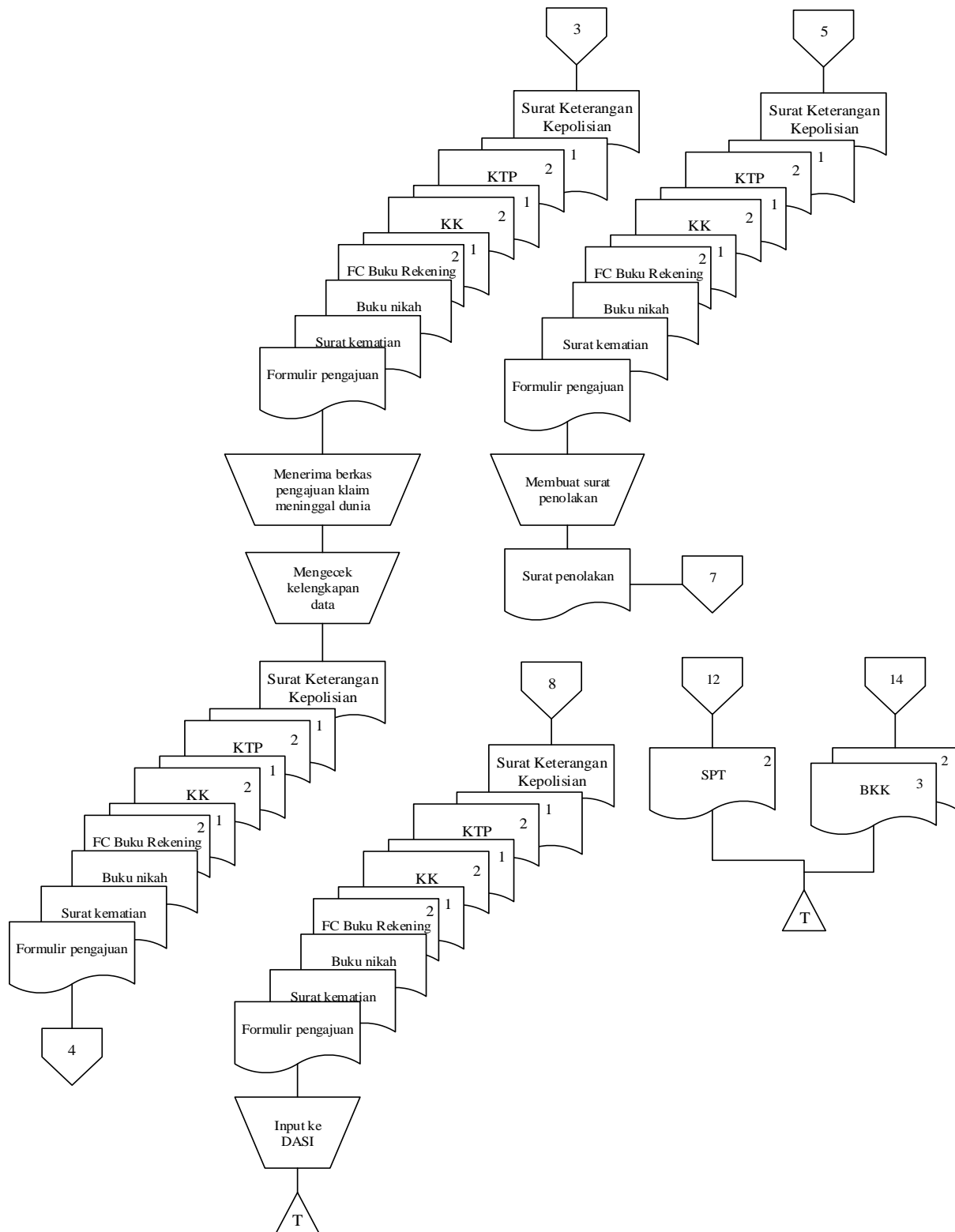




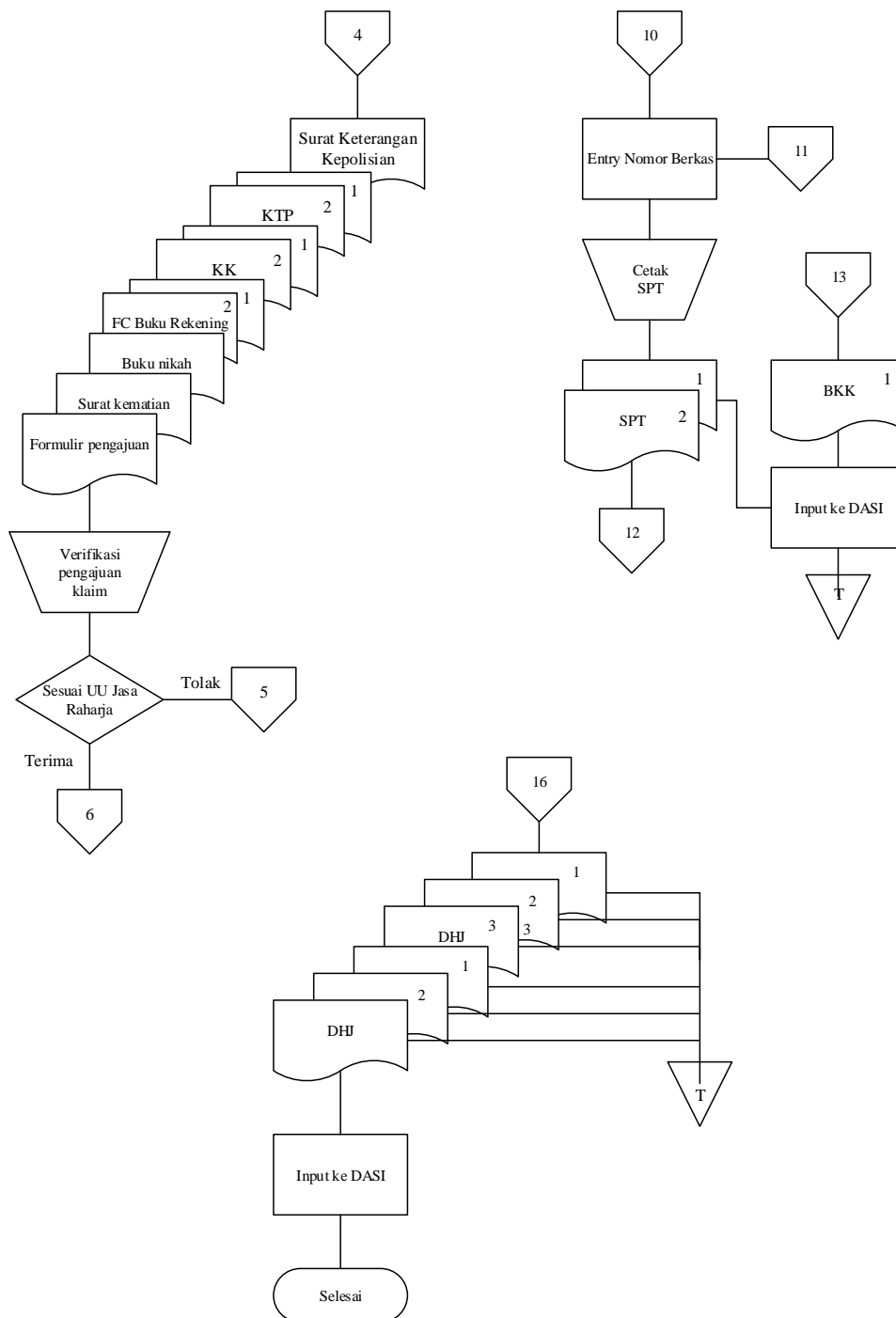
Gambar 3. Flowchart Pembayaran Klaim Kecelakaan Korban Meninggal Dunia

Sumber: Hasil wawancara dan observasi oleh peneliti

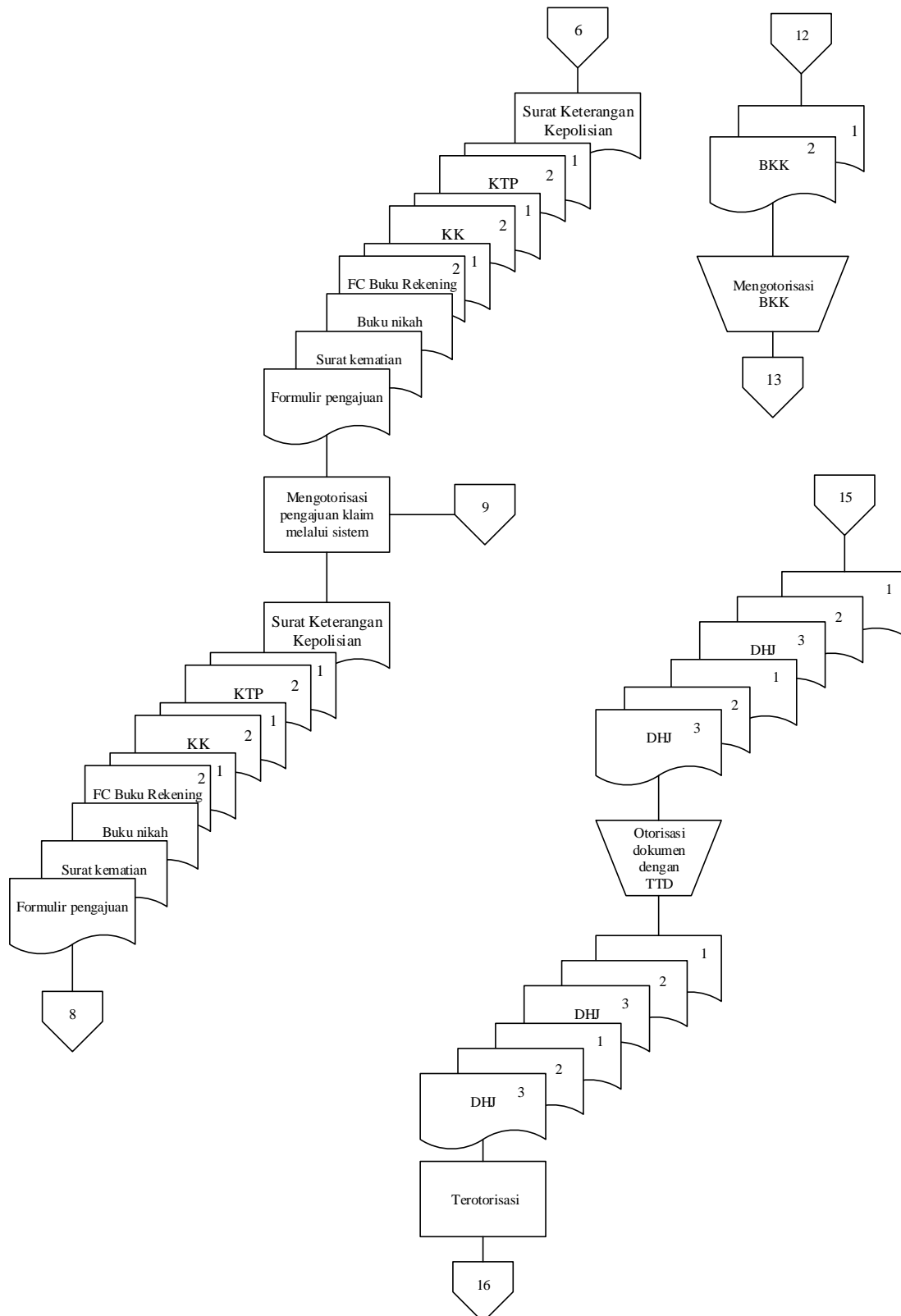
Bidang Pelayanan



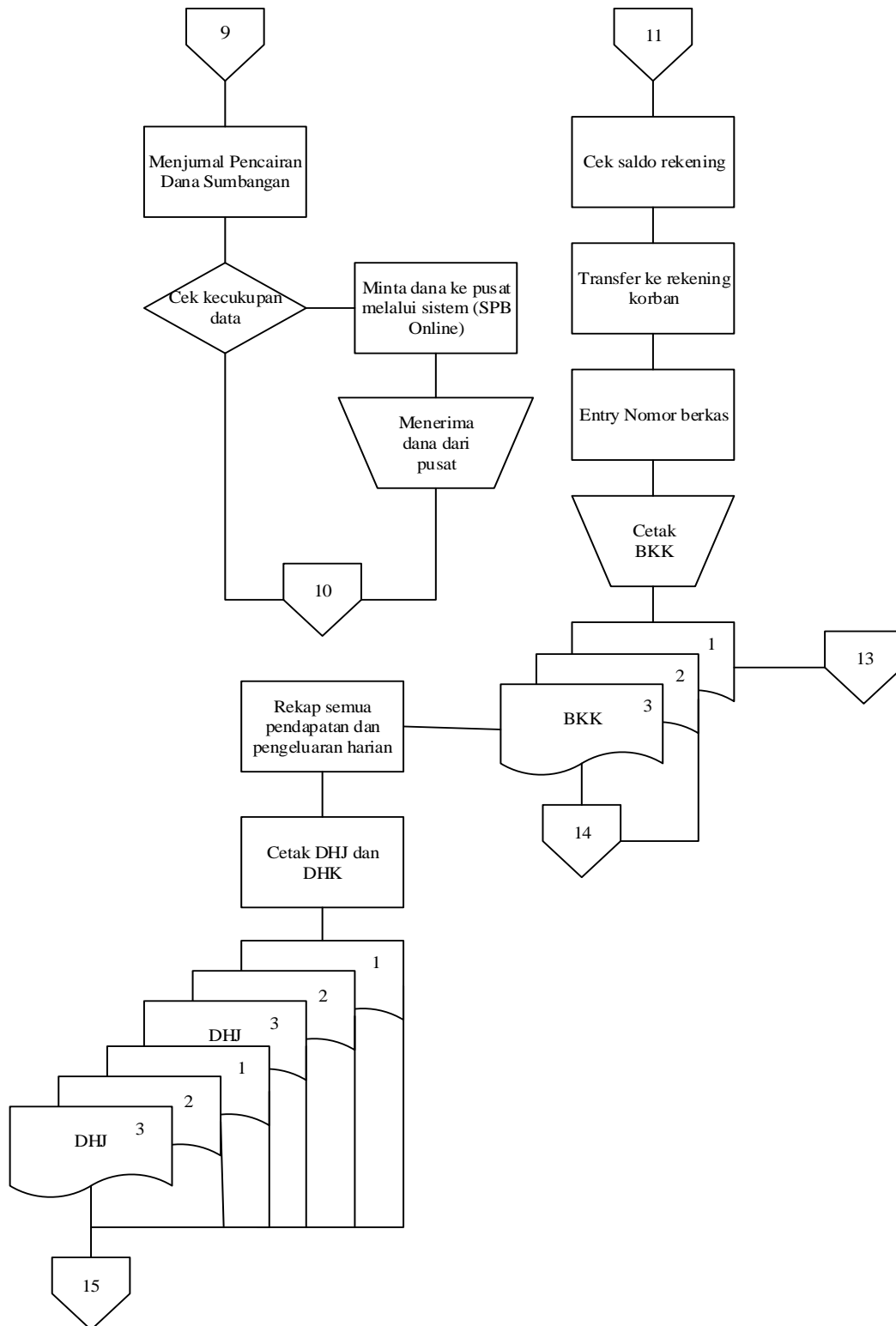
Bagian Keuangan Umum dan Sumber Daya Manusia



Kepala Perwakilan



Kasir



Dokumen dalam Sistem Pembayaran Klaim

Berikut adalah dokumen yang dibutuhkan dalam sistem pembayaran klaim kecelakaan.

1. Surat Perintah Transfer (SPT)

SPT adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Jasa Raharja sebagai dokumen keterangan pembayaran klaim. Dokumen ini ditujukan kepada Bank BRI kantor cabang untuk menghendaki transfer.

2. Surat Perintah Bayar (SPB)

SPB adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Jasa Raharja sebagai dokumen perintah bayar yang ditujukan kepada Bank BRI kantor cabang untuk melakukan transfer sejumlah nominal yang tertera.

Catatan Akuntansi dalam Sistem Pembayaran Klaim

Berikut catatan akuntansi yang dibutuhkan dalam sistem pembayaran klaim kecelakaan.

1. Daftar Harian Jurnal (DHJ)

Daftar harian jurnal berisi semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran. DHJ dicetak setiap hari dan diotorisasi oleh kepala perwakilan.

2. Daftar Harian Kas (DHK)

Daftar harian kas berisi semua pengeluaran kas pada hari itu.

Fungsi Terkait Sistem Pembayaran Klaim

Fungsi berikut ada dalam sistem pembayaran klaim kecelakaan.

1. Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas

Fungsi yang memerlukan pengeluaran kas adalah kepala perwakilan dan kasir. Kepala perwakilan sebagai penanggung jawab atas persetujuan pembayaran klaim. Sementara kasir sebagai penanggung jawab atas pengeluaran pembayaran klaim.

2. Fungsi kas

Fungsi kas adalah kasir yang bertanggung jawab mengisi SPB, menandatangani SPB, dan mengirimkan ke bank BRI untuk perintah pembayaran klaim kepada korban/ahli waris kecelakaan lalu lintas.

3. Fungsi Akuntansi

Fungsi akuntansi adalah kasir yang bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dalam DHK maupun DHJ. Kemudian bagian keuangan melakukan verifikasi dokumen yang diserahkan oleh kasir.

4. Fungsi Pemeriksa Internal

Fungsi Pemeriksa Internal ini terdiri dari (1) Bagian Keuangan dan SDM serta (2) Kepala Perwakilan. Keduanya bertanggung jawab mengawasi, mengecek dan mencocokkan hasil perhitungan saldo kas dengan catatan akuntansi secara berkala. Selain itu, juga kepala perwakilan melakukan inspeksi mengenai saldo kas.

Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan.

Berdasarkan hasil observasi dan pemetaan sistem, maka jaringan prosedur yang membentuk sistem pembayaran klaim adalah:

1. Prosedur pembuatan BKK (bukti kas keluar)
2. Prosedur pembayaran klaim kecelakaan
3. Prosedur pencatatan pengeluaran kas

Pembahasan

Pengendalian Internal pada Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan.

Pengendalian internal pada sistem pembayaran klaim kecelakaan di Jasa Raharja Madiun mengacu pada komponen COSO. Semua komponennya dilaksanakan dengan baik, namun ada salah satu komponen yang tidak dilakukan yaitu kegiatan pengendalian. Dalam hal ini kegiatan pengendalian pada Jasa Raharja tidak sesuai dengan komponen COSO, yaitu adanya perangkapan tugas. Fungsi akuntansi dan fungsi kasir masih dilakukan oleh satu orang. Padahal dalam komponen COSO mengharuskan untuk adanya pemisahan fungsi tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Audila & Pramudyastuti (2020) mengatakan bahwa pengendalian internal PT Jasaraharja Putera dalam penerimaan premi asuransi telah berjalan baik dan efektif karena dokumen dan bagian terkait sudah baik dan prosedurnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Analisis Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan

Penerapan sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan di Jasa Raharja sudah mendukung pengendalian internal. Namun ada beberapa yang belum mendukung pengendalian internal yang harus dilakukan. Pencatatan DHK dan DHJ sudah mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang yaitu bapak kepala perwakilan. Pengecekan berkas yang berasal dari Samsat di cek kembali kelengkapannya oleh bidang pelayanan sebagai penerima berkas pengajuan yang ada di kantor.

Analisis Dokumen Yang Digunakan Pada Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan

Pembayaran klaim kecelakaan menggunakan transaksi secara online yaitu dengan mentransfer pembayaran ke rekening korban/ahli waris/rumah sakit. Seharusnya bukti pembayaran klaim kepada penerima klaim kecelakaan mengkonfirmasi penerimaan pembayaran dengan menunjukkan fotocopy penambahan saldo di rekeningnya. Atau penerima mengisi dokumen yang berisikan nama penerima jumlah santunan, jaminan atas pembayaran klaim kecelakaan dan hak pengaduan jika dalam kurun waktu tertentu korban/ahli waris belum menerima pembayaran santuan dari PT Jasa Raharja. Namun, selama ini di PT Jasa Raharja belum melakukan hal tersebut, tidak ada bukti penerimaan dari penerima pembayaran klaim.

Analisis Catatan yang Digunakan pada Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan

Catatan yang digunakan pada sistem serta prosedur pembayaran klaim sudah sesuai dengan sistem pengeluaran kas. Pencatatan pengeluaran kas dilakukan berdasarkan bukti transaksi pembayaran klaim kecelakaan. Pencatatan DHJ dan DHK dilakukan setiap hari pada saat terjadi transaksi. Namun demikian masih ada perbaikan pada fungsi yang melakukan pencatatan DHJ dan DHK. Seharusnya, pencatatan DHJ dan DHK dilakukan oleh bagian bidang keuangan dan sumber daya manusia bukan bagian kasir.

Analisis Fungsi yang Terkait Pada Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan

Di Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Madiun, fungsi yang terkait pada sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan perlu adanya perbaikan. Fungsi yang perlu diperbaiki adalah fungsi kas dan fungsi akuntansi. Fungsi kas dan fungsi akuntansi masih dilakukan oleh bagian kasir. Seharusnya pencatatan atas transaksi pembayaran klaim kecelakaan

dilakukan oleh bagian keuangan dan sumber daya manusia. Pemisahan kedua fungsi tersebut bertujuan menghindari kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Walaupun tidak ada pemisahan fungsi kas dan fungsi akuntansi, sistem yang ada di Jasa Raharja sudah baik. Kepala perwakilan dapat memonitoring kerja stafnya dengan dari aplikasi yang dijalankan seperti ERP. Kesalahan yang dibuat oleh stafnya data terlihat dalam aplikasi tersebut. Berbeda dengan pendapat Lisma & Oktariansyah (2018) mengatakan bahwa prosedur pengeluaran kas di PT Jasa Raharja (Persero) yang ada di Sumatra Selatan menggunakan sistem ERP masih terdapat banyak kekurangan yaitu ketidaksesuaian antara BKK dengan ERP.

Analisis Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan

Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah jaringan prosedur yang tidak memerlukan permintaan cek. Prosedur yang dilakukan oleh bagian kasir adalah menerima surat perintah transfer dari bagian keuangan dan sumber daya manusia, yang kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran klaim kecelakaan kepada korban/ahli waris. Selanjutnya, kasir melakukan pencatatan pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran kas yang dibuatnya.

Analisis Unsur-Unsur Pengendalian Intern Sistem Pengeluaran Kas Pada Sistem Pembayaran Klaim Kecelakaan

Analisis dalam unsur-unsur pengendalian intern dalam pembayaran klaim kecelakaan di Jasa Raharja, terdapat penyimpangan dari komponen COSO. Penyimpangannya adalah kegiatan pengendaliannya yang masih adanya perangkapan tugas. Perangkapan fungsi kas dan fungsi akuntansi dilakukan oleh satu orang yaitu oleh bagian kasir. Namun, dalam hal ini tidak mempengaruhi pengendalian internal dalam Jasa Raharja. Alasannya sistem yang digunakan untuk menginput transaksi menggunakan sistem ERP. Sistem ERP yang digunakan dapat mengawasi semua kejadian yang dilakukan oleh bagian-bagian terkait. Kepala perwakilan dan pusat dapat memonitoring semua kejadian yang dilakukan oleh bagian-bagian terkait. Jika salah bagian melakukan kesalahan maka kepala bagian ataupun kantor pusat dapat mengetahui dan menegurnya. Selain itu, dalam menggunakan aplikasi ERP semua pengguna memiliki username dan password sendiri-sendiri. Pencatatan tersistem seperti ini fleksibel diterapkan pada saat pandemi, dimana pegawai dapat masuk bergantian sampai kemungkinan terburuk *lockdown*. Semua transaksi dapat dicek di sistem.

Penerapan ERP di Jasa Raharja sudah baik, jika dibandingkan dengan evaluasi pemakaian ERP salah satu provider BUMN, sebagaimana hasil penelitian yang diungkapkan oleh Ibrahim et al. (2020). Sistem aplikasi yang digunakan di Jasa Raharja telah mengadopsi perkembangan revolusi 4.0 sehingga dalam pengendalian internalnya sudah baik. Sebaliknya hasil penelitian Rahma & Mutmainah (2020) komponen COSO yang diterapkan oleh PT Penggadaian (Persero) unit pelayanan cabang Kaliwungu masih ada perangkapan tugas karena efisiensi kerja masih bisa dikendalikan dalam pengawasan kinerja karyawannya.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pembayaran klaim kecelakaan di PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Madiun sudah baik dan mendukung upaya peningkatan pengendalian internal. Sistem aplikasi yang digunakan di Jasa Raharja telah mengadopsi perkembangan revolusi 4.0 sehingga dalam pengendalian internalnya sudah baik.

Saran

Penelitian ini dilakukan pada masa pandemik sehingga terdapat beberapa keterbatasan saat pengambilan data. Untuk penelitian selanjutnya jika wabah sudah berakhir dapat mewawancarai korban secara langsung di tempat.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak bisa mewawancarai secara langsung tentang prosedur pengajuan klaim dan penerimaan pembayaran klaim kecelakaan kepada korban/ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Audila, R. P., & Pramudyastuti, O. L. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Penerimaan Premi Asuransi di PT. Jasaraharja Putera. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(3), 207-216.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30736%2Fjpen.v5i3.353>
- Ibrahim, J. M., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). The Success of The Enterprise Resource Planning (ERP) System in Mobile Communication Operator Branch Offices. In *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi (FIPA)* (pp. 90-104).

- Kabuhung, M. (2013). Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Untuk Perencanaan Dan Pengendalian Keuangan Pada Organisasi Nirlaba Keagamaan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 39-48. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1832>
- Lisma, M., & Oktariansyah. (2018). Analisis Prosedur Pengeluaran Kas Pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 1(1), 40-49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31851/jmediasi.v1i1.2366>
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Purwati, R. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2021). Studi Fenomenologi Perilaku Mahasiswa Pengguna KRS Online. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 13(1), 51-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.33508/jako.v13i1.2699>
- Putri, S. E., & Setiawan, A. B. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Bogor. *Jurnal Akunida*, 2(1), 27-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jakd.v2i1.619>
- Rahma, A. ., & Mutmainah, S. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Pt Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Kaliwungu. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 3(1), 39-51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1970>
- Sugiasuti, R. H., Dzulkirom, M., & Dwiatmamto. (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Pembayaran Klaim Kecelakaan Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus pada PT.Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 13(1), 1-10.
- Sumarauw, M. F. (2013). Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Atas Pembayaran Klaim Asuransi Kesehatan Pada Pt. Askes (Persero). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 331-338. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.1742>